

Pengaruh Kompetensi Pegawai, *Good Governance* Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung

Revi Nurvianti Eliansyah¹, Ridwan²

Universitas Indonesia Membangun¹⁻²

Email Korespondensi: revinuroianti@student.inaba.ac.id ridwan@inaba.ac.id

Article received: 04 Juni 2025, Review process: 23 Juni 2025

Article Accepted: 18 Juli 2025, Article published: 25 Juli 2025

ABSTRACT

The quality of public services in Indonesia continues to face major challenges, as reflected in the high number of public complaints involving delays, inefficiencies, and low satisfaction levels. Baleendah District, as one of the most densely populated areas in Bandung Regency, illustrates this issue, based on pre-survey findings related to timeliness, officer courtesy, and accessibility of services. This study aims to analyze the influence of employee competence, good governance, and the government internal control system on the quality of public services. The research applied a quantitative approach using descriptive-verification methods, involving 100 respondents selected through purposive sampling, and data analysis was conducted using multiple linear regression in SPSS. The findings reveal that employee competence and good governance significantly affect public service quality, while the internal government control system does not show a significant influence. These results imply that the improvement of public service quality relies more on human resource capability and sound governance practices than on formal internal control mechanisms.

Keywords: Public Service, Employee Competence, Good Governance

ABSTRAK

Kualitas pelayanan publik di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, ditandai oleh banyaknya pengaduan masyarakat terkait keterlambatan, ketidakefisienan, dan rendahnya kepuasan layanan. Kecamatan Baleendah sebagai salah satu wilayah padat di Kabupaten Bandung menjadi contoh konkret atas permasalahan tersebut, yang tercermin dari hasil pra-survei masyarakat mengenai ketepatan waktu, keramahan petugas, dan kemudahan akses layanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi pegawai, good governance, dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif-verifikatif, melibatkan 100 responden melalui teknik purposive sampling, serta pengolahan data menggunakan regresi linier berganda yang diuji melalui SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi pegawai dan good governance berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan publik, sementara sistem pengendalian internal pemerintah tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Temuan ini memberikan implikasi penting bahwa peningkatan kualitas layanan publik lebih ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan praktik tata kelola pemerintahan yang baik dibandingkan oleh mekanisme pengawasan internal formal.

Kata Kunci: Pelayanan Publik, Kompetensi Pegawai, Good Governance

PENDAHULUAN

Pemerintah memiliki tanggung jawab fundamental dalam menyediakan layanan publik untuk memenuhi kebutuhan administratif masyarakat. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik masih jauh dari harapan. Masyarakat kerap menghadapi berbagai kendala dalam mengakses layanan yang cepat, tepat, dan adil. Laporan Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2023 mencatat 26.461 kasus pengaduan masyarakat, dengan 8.458 di antaranya merupakan dugaan maladministrasi dan 7.392 berupa laporan publik. Dari jumlah tersebut, 7.909 kasus telah diselesaikan, dengan permasalahan dominan berupa keterlambatan pelayanan dan prosedur yang tidak transparan (Naibaho, 2024).

Pelayanan publik semestinya dilaksanakan secara profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Hardiansyah (2018:13) menyatakan bahwa pelayanan publik merupakan tindakan atau kegiatan yang disampaikan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang bersifat tidak berwujud, tidak mengakibatkan kepemilikan, dan tidak selalu melibatkan produk fisik. Kementerian PANRB dan Diskominfo Jawa Barat mencatat 9.320 laporan pengaduan masyarakat pada 2023 dan 2.878 laporan pada awal 2024. Kabupaten Bandung sebagai salah satu wilayah padat penduduk di Jawa Barat terdiri dari 31 kecamatan, dengan Kecamatan Baleendah sebagai salah satu yang terpadat, yakni 6.567 jiwa/km² (BPS, 2023).

Peneliti melakukan pra-survei terhadap 30 responden warga Kecamatan Baleendah untuk mengetahui persepsi terhadap pelayanan publik. Sebanyak 70% responden menyatakan tidak setuju bahwa pelayanan publik dilakukan dengan tepat waktu, mengindikasikan adanya persoalan serius dalam efisiensi waktu pelayanan.



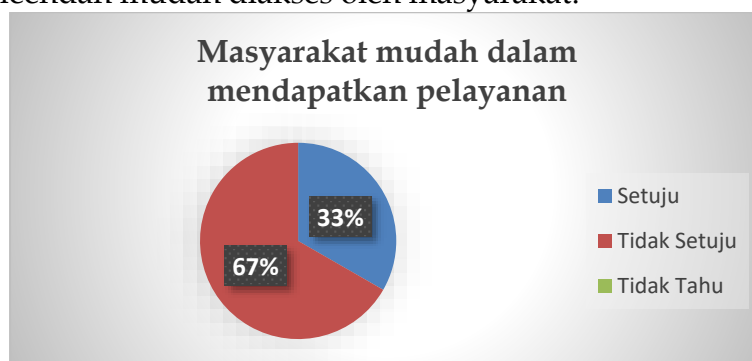
Gambar 1. Hasil Pra-Survei Tentang Ketepatan Waktu Pelayanan

Keramahan dan kesopanan petugas pelayanan juga menjadi sorotan dalam pra-survei. Sebanyak 66% responden tidak setuju bahwa petugas pelayanan bersikap ramah dan sopan. Hal ini mencerminkan lemahnya kompetensi interpersonal aparaturnya dalam memberikan layanan yang humanis dan berorientasi pada penghargaan hak warga negara.



Gambar 2. Hasil Pra-Survei Tentang Keramahan dan Kesopanan Petugas

Kemudahan dalam memperoleh pelayanan turut mendapat penilaian negatif dari masyarakat. Hasil survei menunjukkan bahwa 67% responden menyatakan tidak setuju dengan pernyataan bahwa pelayanan publik di Kecamatan Baleendah mudah diakses oleh masyarakat.



Gambar 3. Hasil Pra-Survei Tentang Kemudahan Dalam Mendapatkan Pelayanan

Kompetensi pegawai menjadi faktor pertama yang diduga memengaruhi kualitas pelayanan publik di wilayah ini. Sutrisno (2019:201) menjelaskan bahwa kompetensi pegawai mencakup penguasaan pengetahuan, keterampilan, serta etos kerja yang dijalankan dalam pelaksanaan tugas. Kurangnya pelatihan dan pengembangan sesuai bidang kerja menyebabkan penurunan kualitas pelayanan. Penelitian oleh Inzaghi & Rosy (2022) membuktikan bahwa kompetensi pegawai memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan publik.

Good governance merupakan faktor kedua yang diyakini memiliki korelasi kuat dengan kualitas layanan. Mardiasmo (2018:22) mendefinisikan good governance sebagai tata kelola pembangunan yang bertanggung jawab dan demokratis, yang mampu mencegah penyalahgunaan dana, menegakkan disiplin anggaran, serta menciptakan sistem politik dan hukum yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Penelitian Saputra W et al. (2024) menegaskan bahwa keberhasilan pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh penerapan prinsip-prinsip good governance.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) menjadi faktor ketiga yang diteliti. Suwanda (2017:68) menyebutkan bahwa SPIP merupakan rangkaian

kegiatan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Penelitian Yono & Hamdani (2022) menyatakan bahwa SPIP berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi pegawai, *good governance*, dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas pelayanan publik di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif-verifikatif untuk menguji pengaruh kompetensi pegawai, *good governance*, dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas pelayanan publik di Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung. Populasi dalam penelitian ini mencakup warga serta aparatur yang terlibat dalam pelayanan publik di Kecamatan Baleendah, dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden yang dipilih menggunakan teknik non-probability sampling melalui pendekatan purposive sampling. Instrumen pengumpulan data berupa kuesioner berskala Likert 5 poin, dengan indikator operasional yang telah disesuaikan untuk masing-masing variabel. Uji validitas dilakukan dengan korelasi Pearson Product Moment dan reliabilitas diuji menggunakan Cronbach's Alpha, yang seluruhnya menunjukkan hasil valid dan reliabel. Analisis data dilakukan melalui regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS, didahului oleh uji asumsi klasik berupa normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t untuk melihat pengaruh parsial, uji F untuk pengaruh simultan, serta koefisien determinasi untuk mengukur kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen pada taraf signifikansi 5 persen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menyajikan analisis pengaruh kompetensi pegawai, *good governance*, dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas pelayanan publik Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Berdasarkan pengumpulan data dari 100 responden, diperoleh gambar statistik deskriptif sebagai berikut:

Tabel 1 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kompetensi Pegawai	100	18,00	30,00	26,2200	2,68019
<i>Good Governance</i>	100	35,00	50,00	43,5800	4,40197
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	100	31,00	45,00	38,9000	3,98355
Kualitas Pelayanan Publik	100	33,00	50,00	41,8800	5,28440

Valid N (listwise)	100
--------------------	-----

Sumber: Olah data SPSS (2025)

Berdasarkan Tabel 1, variabel kompetensi pegawai yang dilambangkan selaku (X1) menampilkan angka rata-rata 26,22 dan standar deviasi 2,68. Angka rata-rata *good governance* yang direpresentasikan selaku (X2) tercatat 43,58 dengan standar deviasi 4,40. Berikutnya, sistem pengendalian internal pemerintah yang dilambangkan selaku (X3) menampilkan rata-rata 38,90 dan standar deviasi 3,98. Ada pula variabel kualitas pelayanan publik (Y) menunjukkan rata-rata 41,88 dengan standar deviasi 5,28.

Untuk memastikan kelayakan model dilakukan serangkaian uji asumsi klasik. Tabel berikut menampilkan temuan uji normalitas:

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	3,63206137
Most Extreme Differences	Absolute	0,085
	Positive	0,071
	Negative	-0,085
Test Statistic		0,085
Asymp. Sig. (2-tailed)		,072 ^c

Sumber: Olah data SPSS (2025)

Berdasarkan hasil uji normalitas pada Tabel 2, diperoleh nilai signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed) sebesar 0,072 melampaui 0,05 atau $0,072 > 0,05$. Sehingga dikatakan bahwa data residual terdistribusi secara normal dan asumsi normalitas dalam regresi telah terpenuhi.

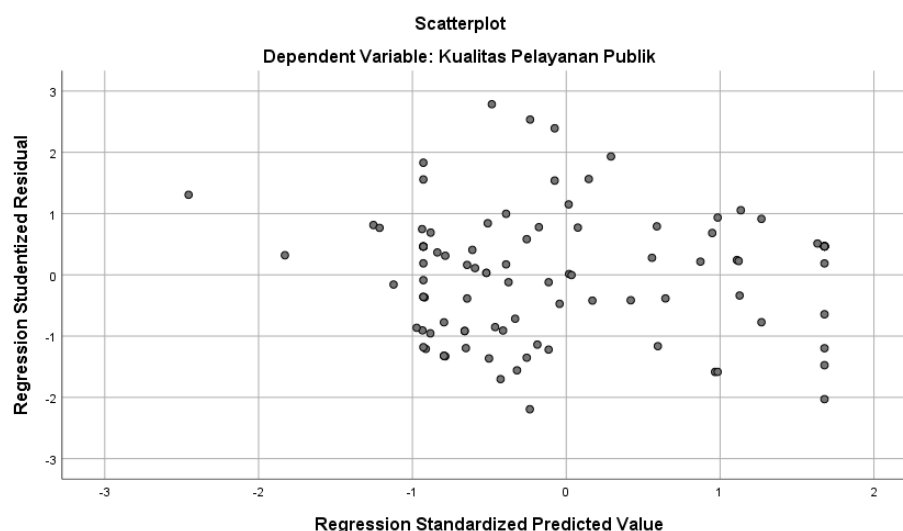
Uji multikolinearitas bertujuan untuk memastikan tidak terdapat korelasi tinggi antar variabel independen. Hasil pengujian ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas

Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF
Kompetensi Pegawai	0,546	1,833
<i>Good Governance</i>	0,510	1,960
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	0,709	1,411

Sumber: Olah data SSPSS (2025)

Merujuk pada data yang ditampilkan dalam Tabel 3, seluruh nilai Tolerance melebihi angka 0,10, sementara VIF seluruh variabel tidak melebihi angka 10. Temuan ini menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen. Dengan demikian, model regresi yang dipakai pada penelitian ini dinyatakan layak untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk memastikan tidak terjadi ketidaksamaan varians residual antar observasi. Hasil uji heteroskedastisitas disajikan berikut:



Sumber: Olah data SPSS (2025)

Gambar 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas yang divisualisasikan melalui Scatterplot di Gambar 4, tampak ada titik statistik menyebar dengan acak pada daerah jalur 0 sumbu y dan tidak menunjukkan pola tertentu. Hal ini menandakan bahwa model regresi memenuhi asumsi heteroskedastisitas, sehingga dinyatakan valid dalam memprediksi variabel kualitas pelayanan publik dengan menggunakan variabel independen yang tersedia. Dengan demikian, berikut analisis regresi linier dapat dilakukan:

Tabel 4 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-1,724	4,386		-0,393	0,695
Kompetensi Pegawai	0,546	0,187	0,277	2,917	0,004
Good Governance	0,516	0,118	0,430	4,376	0,000
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	0,175	0,111	0,132	1,581	0,117

Sumber: Olah data SPSS (2025)

Berdasarkan data yang tercantum dalam Tabel 4, didapatkan bentuk persamaan regresi linier berganda $Y = -1,724 + 0,546X_1 + 0,516X_2 + 0,175X_3$.

Apabila nilai variabel kompetensi pegawai, *good governance*, dan SPIP berada di angka nol, maka konstanta sebesar -1,724 mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan publik diperkirakan bernilai -1,724. Kemudian, koefisien regresi pada kompetensi pegawai (X_1) senilai 0,546 berimplikasi bahwa peningkatan satuan unit dalam kompetensi pegawai berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik sebanyak 0,546 unit. Adapun koefisien regresi pada variabel *good governance* (X_2) sebesar 0,516 mengindikasikan bahwa peningkatan satuan unit *good governance* dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik senilai 0,516 unit. Sementara itu, koefisien regresi untuk SPIP (X_3) senilai 0,175 menyiratkan bahwa setiap peningkatan satuan unit SPIP akan memicu peningkatan kualitas pelayanan publik sebanyak 0,175 unit. Tabel berikut menyajikan hasil uji signifikansi parsial yang menggambarkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen:

Tabel 5 Hasil Uji T

Variabel	t	Sig.
Kompetensi Pegawai	2,917	0,004
<i>Good Governance</i>	4,376	0,000
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	1,581	0,117

Sumber: Olah data SPSS (2025)

Merujuk hasil uji-t yang tercantum dalam Tabel 5, didapatkan t hitung untuk kompetensi pegawai sebesar $2,917 > 1,984$ t-tabelnya, serta tingkat signifikansi senilai $0,004 < 0,05$, sehingga kompetensi pegawai memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Selain itu, nilai t hitung untuk *good governance* $4,376 > t$ tabel 1,984 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$, yang menunjukkan bahwa *good governance* memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Sebaliknya, SPIP tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kualitas pelayanan publik, karena dilihat t hitung $1,581 < t$ tabel 1,984 serta signifikansinya $0,117 > 0,05$. Uji f untuk menguji apakah seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen, dan berikut hasilnya:

Tabel 6 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1458,565	3	486,188	35,738	,000 ^b
	Residual	1305,995	96	13,604		
	Total	2764,560	99			

a. Dependent Variable: Kualitas Pelayanan Publik

b. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi Pegawai, Good Governance

Sumber: Olah data SPSS (2025)

Dilihat nilai F hitung dalam Tabel 6, yakni sebesar $35,738 > F$ tabel dengan angka 2,70, dan angka signifikansinya $0,000 < \text{dari angka } 0,05$, dapat disimpulkan bahwa kompetensi pegawai, *good governance*, dan sistem pengendalian internal pemerintah secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan publik Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Model regresi yang diterapkan di penelitian terbukti andal dan layak untuk menjelaskan variasi dalam kualitas pelayanan publik.

Koefisien determinasi diterapkan untuk menakar seberapa besar keterlibatan variabel independen dalam menyatakan variasi pada variabel dependen, sebagaimana terpampang nyata di bawah ini:

Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,726 ^a	0,528	0,513	3,68838
a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi Pegawai, Good Governance				
b. Dependent Variable: Kualitas Pelayanan Publik				

Sumber: Olah data SPSS (2025)

Berdasarkan nilai R^2 yang tercantum pada Tabel 7 dengan R Square (R^2) sebesar 0,528, kompetensi pegawai, *good governance*, serta sistem pengendalian internal pemerintah secara bersama-sama menjelaskan 52,8% variasi kualitas pelayanan publik Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Sementara itu, sebanyak 47,2% variasi lainnya terpengaruh oleh komponen lain yang tidak dibahas dalam lingkup penelitian ini.

Hasil penelitian ini, mengungkapkan kompetensi pegawai berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Hal ini menunjukkan kenaikan kompetensi pegawai diikuti oleh kenaikan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Temuan ini searah dengan hasil penelitian dari Inzaghi & Rosy (2022) dan Pradana et al. (2022). Serta penelitian yang lain mengenai kompetensi oleh Widodo & Febriyanti (2024) mengemukakan bahwa kompetensi memiliki pengaruh.

Selain itu, *good governance* juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Yakni, semakin baik *good governance*, maka semakin baik pula kualitas pelayanan pada masyarakat. Hasil ini mendukung hasil temuan dari Saputra W et al. (2024) dan Prameswari & Widiyawati (2024). Penelitian lainnya mengenai *good governance* oleh Patria & Arismutia (2022) dan Sunjaeni & Berliani (2024) bahwa *good governance* memiliki pengaruh.

Di sisi lain, sistem pengendalian internal pemerintah tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan publik, yang bertentangan dengan temuan Yono & Hamdani (2022). Namun, temuan ini sejalan dengan temuan Dewi et al. (2021) menyatakan SPIP tidak berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik. Adapun penelitian yang lain mengenai sistem pengendalian internal menurut Handayani & Ridwan (2024) mengemukakan bahwa sistem

pengendalian internal tidak memiliki pengaruh apapun. Secara simultan, temuan ini memperlihatkan bahwa ketiga variabel independen tersebut memiliki pengaruh terhadap kualitas pelayanan publik.

SIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan uji-t, penelitian ini menyimpulkan bahwa kompetensi pegawai dan *good governance* memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Sebaliknya, sistem pengendalian internal pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas pelayanan publik. Temuan ini menerangkan jika peningkatan kualitas pelayanan publik lebih banyak dipengaruhi kompetensi pegawai dan *good governance* yang efektif. Selain itu, hasil uji-F mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan publik dipengaruhi secara simultan oleh kompetensi pegawai, *good governance* dan sistem pengendalian internal pemerintah. Temuan ini memberikan manfaat bagi instansi publik yang bergerak pada aspek pelayanan publik, serta dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Dewi, N. L., Gunawan, Y., Mangunsong, S., & Meiliana, Y. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Budaya Organisasi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Berkelanjutan. *Jurnal Manajemen Maranatha*, 20(2), 99–106. <https://doi.org/10.28932/jmm.v20i2.3024>
- Handayani, D., & Ridwan. (2024). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)*, 04(02), 1073–1082. <https://doi.org/doi.org/jebma.v4n2.4014>
- Hardiansyah. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik (Edisi Revisi)*. Gave Media.
- Inzaghi, A. O., & Rosy, B. (2022). Pengaruh Kompetensi Pegawai Dan Fasilitas Kerja Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Desa Purworejo. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(4), 1294–1307. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i4.1081>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Diva Press.
- Naibaho, R. (2024, March 14). Ombudsman RI Tangani 26 Ribu Kasus Pelayanan Publik Sepanjang 2023. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-7241812/ombudsman-ri-tangani-26-ribu-kasus-pelayanan-publik-sepanjang-2023>
- Patria, G., & Arismutia, S. A. (2022). The Influence Of Independence, Professionalism And Good Governance On Internal Audit Quality studies At The Inspectorate Of West Bandung Regency. *Journal of Accountancy Inaba (JAI)*, 01(02), 104–112. <https://doi.org/https://doi.org/10.56956/jai.v1i02.128>
- Pradana, H. A., Kismartini, K., & Aripin, S. (2022). Pengaruh Kompetensi Pegawai, Disiplin Kerja, dan Kinerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Publik

- Pada Bea Cukai Madiun. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(2), 760.
<https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i2.6196>
- Prameswari, G., & Widiyawati, D. (2024). Pengaruh Good Governance, Efektivitas Kerja Pegawai, Dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 13.
- Saputra W, Lestari U, & Rizqi M. (2024). Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Desa Tegalorejo (The Influence of Good Governance Principles on The Quality of Public Services at The Tegalorejo Village Office). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, 9(1).
- Sunjaeni, M., & Berliani, K. (2024). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Good governance, Dan komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial (Pada Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung). *Judicious: Journal Of Management*, 05(01), 97–110.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37010/jdc.v5i1.1625>
- Sutrisno, E. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Kencana.
- Suwanda, D. (2017). *Sistem Pengendalian Internal Pemerintah*. PMM Manajemen.
- Widodo, D., & Febriyanti, D. (2024). Pengaruh Independensi, Fee Audit, Kompetensi Dan Skeptisme Profesional Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada 14 Kantor Akuntan Publik di Provinsi Jawa Tengah). *Economic Reviews Journal*, 3(2), 1324–1337.
<https://doi.org/https://doi.org/10.56709/mrj.v3i2.459>
- Yono, & Hamdani, D. (2022). The Influence Of Good Governance, Community Perception And Government Internal Control Systems On The Quality Of Public Services Study At Cidamar Village Office, Cianjur Regency. *Journal of Accountancy Inaba (JAI)*, 01(02).
<https://doi.org/https://doi.org/10.56956/jai.v1i02.127>